

Desiminasi Analisis Instrumen Kabupaten Sehat Sebagai Implementasi *Good Governance* Di Kabupaten Tana Tidung

Daud Nawir¹, Nur Indah Noviyanti², Hendy Lesmana³, Gusriani⁴
¹⁻⁴Universitas Borneo Tarakan/Institusi; Jln. Pantai Amal Baru No.1 Kota Tarakan
Email :daudnawir0520@gmail.com¹

Kilas Artikel

Volume 2 Nomor 2
Agustus 2022
DOI:xxx/ejpm.v%i%.xxxx

Article History

Submission: 05-08-2022
Revised: 15-08-2022
Accepted: 15-08-2022
Published: 15-08-2022

Kata Kunci:

Analisi, Instrumen,
kabupaten sehat.

Keywords:

Analysis, Instrument, healthy
district.

Korespondensi:

(Nur Indah Noviyanti)
daudnawir0520@gmail.com

Abstrak

Rencana strategis dalam pembangunan masyarakat merupakan kewajiban setiap kementerian yang mengacu pada (RPJMN). Kementerian Kesehatan bersama Kementerian dalam Negeri telah meyakini terlaksananya sebuah program yang mengakomodir seluruh aspek/tatanan dalam mewujudkan Kabupaten /Kota bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni sebagai tempat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah serta penghidupan masyarakat yang lebih baik. Terdapat 10 kategori kabupaten/kota sehat yang dibagi berdasarkan permasalahan khusus yaitu :1) kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum; 2) Kehidupan Masyarakat Sejahtera Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi; 3) Pasar; 4) Pendidikan; 5) Kehidupan Sosial Yang Sehat dan Penanganan Bencana; 6) Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas; 7) Perkantoran, Perindustrian, IKM dan UMKM; 8) Pariwisata; 9) Rumah Ibadah; 10) Kota Pintar/Smart City. Metode yang digunakan berupa pengisian kuesioner, wawancara, FGD, dan data sekunder. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan usaha yang lebih baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mencapai penghargaan Kabupaten Sehat. Mulai dari prasyarat ODF yang persentasinya masih cukup rendah, sedangkan untuk beberapa indikator pokok telah terpenuhi dengan estimasi persentase 70%. Tatanan wajib dan tatanan tambahan masih diperlukan strategi untuk meningkatkan dan memenuhi indikator/aspek/kriteria instrumen kabupaten sehat. Manfaat PKM ini sebagai pedoman dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.

Abstract

The strategic plan in community development is the obligation of every ministry that refers to the (RPJMN). The Ministry of Health and the Ministry of Home Affairs have agreed on the implementation of a program that accommodates all aspects/orders in realizing a clean, comfortable, safe, and healthy Regency/City to live in as a place to live). improve productivity and regional economy as well as better people's livelihoods. There are 10 categories of healthy districts/cities which are divided based on specific problems, namely: 1) residential areas, public facilities and infrastructure; 2) Independent Healthy Community Life, Food Security and Nutrition; 3) Market; 4) Education; 5) Healthy Social Life and Disaster Management; 6) Transportation and Traffic Regulations; 7) Offices, Industry, IKM and MSMEs; 8) Tourism; 9) Houses of Worship; 10) Smart City/Smart City. The method used in the



form of filling out questionnaires, interviews, FGDs, and secondary data. The results of this activity indicate that it is necessary to make better efforts from the government and the community to achieve the Healthy District award. Starting from the ODF prerequisites, the presentation is still quite low, while some key indicators have been met with an estimated percentage of 70%. Mandatory arrangements and additional arrangements are still needed strategies to improve and fulfill indicators/aspects/criteria for healthy district instruments. The benefits of this PKM are as guidelines and evaluation materials for the government in an effort to improve the health and welfare of the community in Tana Tidung Regency

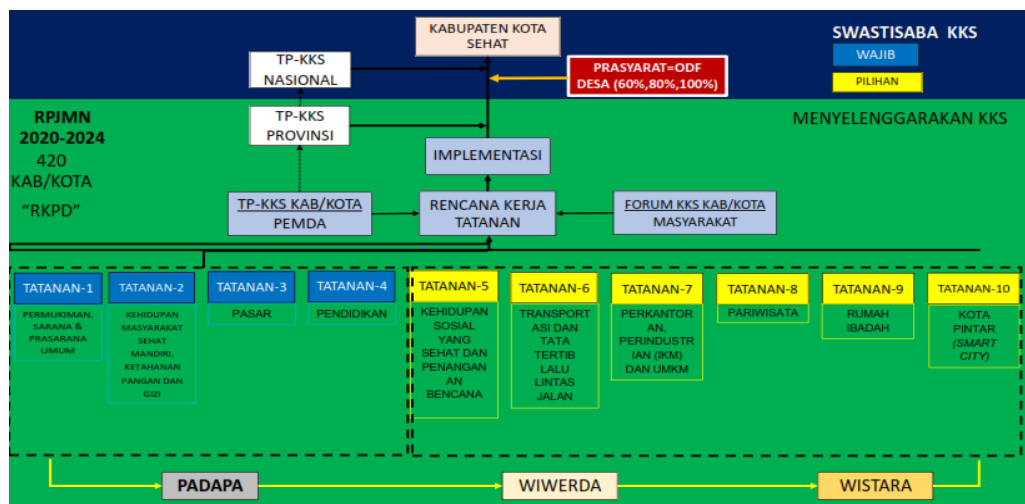
1. PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat merupakan ukuran menunjukkan kemajuan dan kemunduran suatu negara. Peninjauan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa aspek yaitu, kesehatan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengukuran kualitas hidup ataupun taraf hidup masyarakat mengacu pada salah satu aspek vital yaitu kesehatan. Kemudian hal ini menjadi bagian strategis dalam menyusun program-program masyarakat yang disusun oleh pemerintah maupun swasta untuk mengakomodir kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sesuai UUD 1945 pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya pembangunan kesehatan dilakukan oleh seluruh unsur Bangsa Indonesia yang tujuannya dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Penyusunan Rencana Strategi merupakan kewajiban setiap kementerian yang tertuang Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian Kesehatan merupakan leading sector dalam meningkatkan derajat kesehatan telah menyusun RPJMN bidang kesehatan 2020-2024 yaitu “ meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya *promotive* dan *preventif*, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi” (Kementerian Kesehatan RI., 2022).

Tidak dapat kita lepas bahwa semakin maju peradaban, maka semakin kompleks pula masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Perlu upaya yang mampu menggerakkan seluruh sektor untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hasil prediksi pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, dimana komposisi dari usia produktif (15-65 tahun) akan lebih besar yaitu 64% dari 297 juta jiwa dibandingkan usia non produktif. Namun bonus demografi ini tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional, namun dapat juga memberikan dampak negative terhadap upaya pembangunan bangsa. Saat bangsa Indonesia tidak mempersiapkan pondasi terhadap kualitas sumber daya manusia maka, hal ini akan menjadi dampak berantai dari ketimpangan sosial yang mengakibatkan masalah meningkatnya kemiskinan, pengangguran, serta masalah lain pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Setiawan, 2018). Kementerian Kesehatan bersama Kementerian dalam Negeri telah menyepakati terlaksananya sebuah program yang mengakomodir seluruh aspek/tatanan dalam mewujudkan Kabupaten / Kota yang layak, bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni sebagai tempat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah serta penghidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk mendukung visi kementerian kesehatan dikeluarkannya Peraturan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.



Program kabupaten/kota sehat memberikan konsep bahwa kabupaten/kota sehat dibentuk pada level *Bottom Up* yaitu menyisir desa/kelurahan hingga pada level tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan dari Kabupaten/kota sehat melalui beberapa indikator dari semua kegiatan yang terintegrasi dan disepakati oleh setiap unsur lingkungan (masyarakat dan pemerintah daerah/kota). Permasalahan yang paling banyak dijumpai pada program Kabupaten/kota sehat adalah belum maksimalnya peran dan informasi pemerintah dalam penyampain inforamasi terkait program Kabupaten/kota sehat (Hapsari, D., Sari, P., Afifah, T., 2007). Program Kabupaten/kota sehat terdiri dari beberapa kegiatan yang melibatkan peran aktif pemberdayaan masyarakat, instansi swasta, LSM dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. terdapat 10 kategori kabupaten/kota sehat yang dibagi berdasarkan permasalahan khusus yaitu :1) kawasana permukiman, sarana dan prasarana umum; 2) Kehidupan Masyarakat Sehta Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi; 3) Pasar; 4) Pendidikan; 5) Kehidupan Sosial Yang Sehat dan Penanganan Bencana; 6) Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas; 7) Perkantoran, Perindustrian , IKM dan UMKM; 8) Pariwisata; 9) Rumah Ibadah; 10) Kota Pintar/Smart City. Adapun indikator pokok yang menjadi prasyarat terciptanya Kabupaten/Kota Sehat Yaitu: Angka Partisipasi Sekolah, indeks keluarag sehat, akses air minum. Akses sanitasi, angka Kawasan kumuh, angka kriminalitas, dan tidak adanya gelandangan (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri RI, 2020).



Gambar 1. Alur dan Tingkatan Kabupaten/Kota Sehat.

Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu; mendesiminasi pengisian instrument Penilaian Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Tana Tidung sebagai upaya *Implementasi Good Governance*. Instrumen penilain Kabupaten/Kota Sehat merupakan bagian dari upaya pemerintah agar memiliki pedoman serta evaluasi dalam upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat (PKM) yang dilaksankn oleh tim dilaksanakan mulai bulan Mei -Juli 2022 di Kabupaten Tana Tidung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pengisian kuesioner, wawancara, *Forum disscussion group* (FGD), dan data sekunder. Metode pengisian kuesioner dilakukan untuk mengetahui presentase aspek/kriteria dari setiap indikator tatanan dan prasyarat Kabupaten

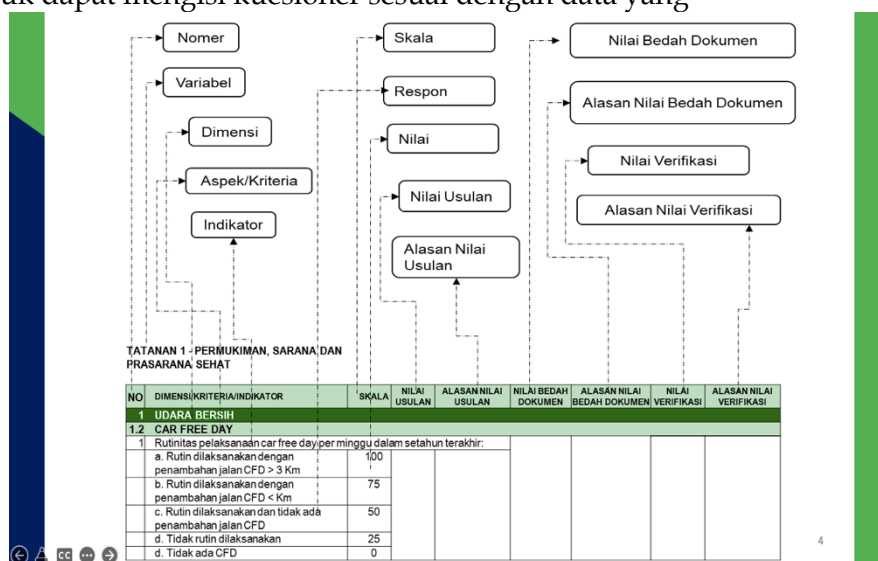


Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Sehat sesuai dengan instrumen. Selanjutnya metode wawancara dilakukan untuk mengambil informasi dan data secara lansung dari pihak yang terkait sehingga kita dapat memperoleh informasi langsung yang berguna untuk menjelaskan/menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Tana Tidung. Metode yang yang terkahir dilakukan pada PKM ini yaitu FGD, diman kegiatan ini bertujuan untuk menggali, memberikan pendapat, dan mendiskusikan hasil temuan dari beberapa metode secara sistematis sehingga hasil yang didapatkan akan memberikan banyak informasi dan masukan. Pada saat FGD ,kami sebagai tim merepresentasikan hasil metode dari pengisian kuesioner dan wawancara dan mengambil kesimpulan sejauh mana kondisi Kabupaten Tana Tidung untuk menjadi Kabupaten Sehat. Data sekunder pada PKM ini bertujuan untuk memperkaya informasi sebagai penguat data dukung.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan dalam PKM yang dilakukan yaitu dengan metode pengisian kuesioner dan wawancara dari instrumen Kabupaten/Kota Sehat terbaru. Pengisian ini melibatkan beberapa instansi terkait seperti dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR), dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, dinas Kesehatan, Dinas peerdagangan, koperasi, dan UMKM, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian Penduduk KB, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dan Perhubungan, Badan Pusat Statistik Dan Tokoh Agama wilayah Kabupaten Tana Tidung. Pada tahapan kegiata ini tim PKM melakukan penyampain tujuan dari pengisian instrumen kabupaten/kota sehat, serta briefing terhadap perwakilan instansi untuk dapat mengisi kuesioner sesuai dengan data yang



Gambar 2. Format isntrumen Penilaian Kabupaten Kota sehat dan terdiri dari 10 Tatanan



Tabel 1 Komponen Penilaian Kabupaten/Kota Sehat

No	Tatanan	Dimensi	Aspek
1	Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum.	11	49
2	Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi.	13	45
3	Pasar	1	11
4	Pendidikan	10	15
5	Kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana	9	35
6	Transportasi dan Tata tertib lalu lintas jalan	8	20
7	Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM	5	17
8	Pariwisata	7	26
9	Rumah Ibadah	3	7
10	Kota Pintar	1	7



Gambar 3. Pengisian kuesioner, Wawancara, dan pengambilan data sekunder di beberapa OPD/Lembaga yang terkait pada instrumen Kabupaten Sehat.

Setelah mendapatkan semua data melalui metode pengisian kuesioner, wawancara dan data sekunder, selanjut data tersebut kami analisis dan hasilnya kami presentasikan dalam FGD. FGD yang dilakukan terdiri dari beberapa bagian yaitu FGD awal, FGD Antara dan FGD Penutup. Pada FGD tersebut terdapat hasil dan rekomendasi serta kesimpulan terkait gambaran untuk pemerintah, dan instansi/lembaga, dan masyarakat terhadap penilaian Kabupaten sehat Kabupaten Tanna Tidung.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301



Gambar 4. Pelaksanaan FGD dihadiri PD/Lembaga dan masyaakat

Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, angka desa bebas buang air/ *ODF Defecation (Open Free)* sembarangan adalah 25 %, sehingga sebagai prasyarat untuk penilaian kabupaten/kota sehat belum terpenuhi, dibutuhkan usaha yang kuat untuk meningkatkan desa bebas buang air besar sembarangan di Kabupaten Tana Tidung. Indikator kelembagaan yang digunakan pada penilain terkait kelembagaan dari beberapa komponen tidak hanya dari pemerintah daerah, namun juga berasal dari masyarakat, mitra, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Kabupaten kota Sehat yang dibuktikan melalui SK, rencana kerja, sekretariat, laporan kegiatan, serta dokumen lain penunjang kelembagaan dalam KKS. Indikator kelembagan terkait Kabupaten Sehat belum dilaksanakn. Sedangkan pada indikator tatanan wajib yang terdiri dari :

- 1) Pemukiman, sarana dan prasarana umum
- 2) Kehidupan masyarakat sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi
- 3) Pasar Sehat
- 4) Pendidikan

Dari tatanan 1 -4 diperlukan usaha lebih keras lagi, menurut data hasil penilaian instrumen yang telah di isi pada tatanan wajib ini belum mencapai 70% untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba (Kabupaten/Kota Sehat) pada kategori Padapa. Sedangkan untuk hasil dari indikator tatanan tambahan ,yang terdiri dari:

- 1) Kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana
 - 2) Transportasi dan Tata tertib lalu lintas jalan.
 - 3) Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM.
 - 4) Pariwisata.
 - 5) Rumah Ibadah.
- 1) Kota Pintar.

Hasil dari kegiatan pengisian kuesioner, wawancara dan data sekunder yaitu, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih untuk menunjang variabel dan dimensi/kriteria dari indikator instrumen Kabupaten/kota sehat. Tingkatan setelah Padapa adalah Wiwerda dan yang tertinggi adalah Wistara. Berikut adalah kriteria presentase Penghargaan Swasti Saba Pada Penilaian Kabupaten/Kota Sehat.



Tabel 2. Kriteria Penghargaan Swasti Saba Pada Penilaian Kabupaten/Kota Sehat.

Kriteria	Padapa	Wiwerda			Wistara		
		1	2	3	1	2	3
Desa ODF (Prasyarat)	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%
Kelembagaan	70%	70%	75%	79%	80%	90%	100%
Pokok	70%	70%	75%	79%	80%	90%	100%
Tatanan	70%	70%	75%	79%	80%	90%	100%
Cakupan Wilayah	60% Kec. Dan 100% Desa/Kel.	70% Kec. Dan 100% Desa/Kel.	75% Kec. Dan 100% Desa/Kel.	80% Kec. Dan 100% Desa/Kel.	90% Kec. Dan 100% Desa/Kel.	95% Kec. Dan 100% Desa/Kel.	100% Kec. Dan 100% Desa/Kel.
Jumlah Tatanan	4	5	6	7	8	9	10

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat bermanfaat yaitu sebagai pedoman dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu manfaat PKM ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat berperan dalam mengambil kebijakan, memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Tana Tidung. Penyelenggaraan Kabupaten Kota sehat memerlukan kelembagaan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercipta rasa percaya. Masyarakat dengan kondisi yang kondusif karena pemerintah hadir sebagai *good governance* bagi masyarakat dapat meningkatkan produktifitas dan ekonomi penghidupan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. (2022) "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Tidung 2020."
<https://tanatidungkab.bps.go.id/publication/2022/03/23/2d1ad7db5bd45f0a1c4e3480/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-tana-tidung-2020.html>
<https://tanatidungkab.bps.go.id/publication/2022/03/23/2d1ad7db5bd45f0a1c4e3480/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-tana-tidung-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. (2022) "Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2022."
<https://tanatidungkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/60bacac731ae7b07e3bbefd1/kabupaten-tana-tidung-dalam-angka-2022.html>
- Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung. (2022)



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Daud Nawir, Nur Indah Noviyanti, Hendy Lesmana, Gusriani
Desiminasi Analisis Instrumen Kabupaten Sehat Sebagai Implementasi Good Governnace
Di Kabupaten Tana Tidung

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. (2022)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tana Tidung. 2022
- Direktorat Kesehatan Keluarga. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT). <http://kesga.kemkes.go.id/>. 2017
- Fairizi D. (2015). Analisis dan Evaluasi saluran drainase pada kawasan perumnas talang kelapa di subdas lambidaro kota Palembang. Sipil, Jur Tek Sriwijaya, Univ Besar, Bukit Sumatera, Palembang.
- Hapsari., Sari, P., Afifah, T., S. (2007). Gambaran Kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat pada Lima Kota di Indonesia. *Media Litbang Kesehatan*, XVII(3), 19-28.
- Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). *Draft Instrumen Penilaian KKS*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Rencana Strategi Kemenkes*.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301